



LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI PUBLIK (FKP)

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 21775**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.

Dalam penyelesaian laporan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak instansi terkait dan terkhusus bagi ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sendiri yang telah ikut berpartisipasi dalam penyempurnaan data yang diperlukan, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam membantu mendukung penyusunan laporan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Pelaihari, 03 Juni 2024

Kepala Satuan,



MUH. KUSRI, SP

NIP. 19690315 199803 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Analisis Hasil Pelaksanaan FKP

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Surat Undangan

LAMPIRAN II Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN III Salinan Daftar hadir

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang mengamanatkan bahwa Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) wajib melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) serta mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keterlibatan masyarakat lebih jelasnya tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik, serta peran aktif dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik. Untuk itu dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang di wadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP)

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

2. Tujuan dan Manfaat

1) Tujuan

- a. Memastikan penyelenggaraan FKP sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggara layanan dengan harapan publik, dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengawasan, evaluasi dan dukungan;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan.

2) Manfaat

Dengan dibentuknya Forum Konsultasi Publik (FKP) ini di maksudkan dapat memberikan masukan dan saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Penyelenggara pelayanan yang ada di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Forum Konsultasi Publik akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024 bertempat di Algoritma Café dan Resto

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), sedangkan Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari Polres Tala, Kodim 1009, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, BNN, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik, KNPI, Pengurus Kwarcab, Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa (HPPMTL), Karang Taruna, BPK Palam, LSM, Wartawan

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik meliputi :

- Rapat internal dengan tema “Penanganan Atas Gangguan Trantibum di Wilayah Kabupaten Tanah Laut”
- Pelaksanaan forum konsultasi publik melibatkan stakeholder dan lintas kerja dalam penyelesaian yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi penanganan atas gangguan ketentraman dan ketertibam umum
- Penyampaian materi
- Diskusi

4. Susunan Acara FKP

- Pembukaan
- Sambutan sekaligus Laporan dai Kepala Satpol PP dan Damkar
- Penyampaian materi
- Diskusi / tanya jawab
- Doa / Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Analisis Hasil Pelaksanaan FKP

Sesuai dengan Motto yaitu "WANI HANGIT" (BerwibaWa, HumaNIs, GagaH PerkasA, MelinduNGi, Ikhlas, Tegas), maka Satpol PP dan Damkar mengambil tema "Penanganan Atas Gangguan Trantibum di Wilayah Kabupaten Tanah Laut".

Dalam melaksanakan tugas termasuk sebagai Pemangku SPM sangatlah penting dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dimana melalui cegah dini atau mencegah gangguan trantibum di wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan menerima laporan dari masyarakat atas gangguan yang timbul, banyak sekali yang harus diatasi dari segala permasalahan yang timbul di kehidupan sehari-hari di masyarakat. Peran stakeholder pun tidak pernah lepas untuk membantu mengatasi atas gangguan yang terjado dari TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.

Kegiatan penanganan atas gangguan trantibum ini merupakan kegiatan rutin Satpol PP dan Damkar guna merangkum pokok permasalahan dalam menjaga trantibum di wilayah tanah laut. Adapun macam-macam gangguan trantibum yang sering terjadi yaitu:

1. Berbagai macam gangguan dan pengamen
2. Gangguan dari pengemis
3. Dari ODGJ
4. Pesta Miras
5. Penjual Miras di lingkungan masyarakat
6. Anak Jalanan
7. Sexs Bebas
8. Prostitusi Online
9. Dan lain-lain

Tujuan Forum Komunikasi Publik (FKP) dalam Penanganan Gangguan Trantibum adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman
 - ✓ Penyelengaran pelayanan dan masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang sama
 - ✓ Penanganan

2. Solusi
 - ✓ Perpecahan masalah
 - ✓ Diskusi
 - ✓ Koordinasi
 - ✓ Panisme yang diberikan
3. Memberikan kesempatan eksternal memberikan masukan
 - ✓ Stakeholder perlu adanya saran dan masukan untuk memberikan gambaran atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul
 - ✓ Unsur forum memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara atau pelayanan yang diterima selaku termasuk pengguna layanan

Adapun prinsip-prinsip Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) ini sebagai berikut:

1. Sederhana
 - Mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau
2. Transparansi
 - Mudah diakses oleh masyarakat
3. Akuntabel
 - Hal-hal yang diatur dalam FKP ini harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan
4. Partisipatif
 - Melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan
5. Keadilan
 - Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental
6. Berkelanjutan
 - FKP harus terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan.

Sedangkan bentuk-bentuk Forum Komunikasi Publik (FKP) terdiri dari:

1. Tatap Muka

Merupakan kegiatan utama FKP, dapat dilakukan dalam bentuk FGD, Publik Hearing, Loka Karya, Musrenbang

2. Non Tatap Muka

Merupakan kegiatan pendukung dari Forum Tatap Muka seperti media komunikasi radio, talkshow Televisi, Media Sosial, Aplikasi Online, Survey dan Kanal Pengaduan.

Para pihak yang terlibat dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah sebagai berikut:

1. Ahli / Praktisi
2. Organisasi Masyarakat Sipil
3. Media Massa
4. Penyelenggaraan Layanan
5. Pengguna Layanan
6. Stakeholder Pelayanan Publik

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) terdiri dari :

1. Persiapan

Bagaimana FKP ini dipersiapkan dengan baik-baiknya agar memperoleh hasil yang diinginkan / maksimal

2. Pelaksanaan

Proses Forum Komunikasi Publik itu berlangsung

3. Pasca Pelaksanaan

Bagaimana setelah pelaksanaan FKP itu sendiri

4. Hal Utama

Proses pelaksanaan FKP itu menjadi hal yang sangat penting karena disinilah akan dirumuskan suatu solusi Bersama atas permasalahan yang ada, bagaimana menjalankan solusi yang dihasilkan tersebut.

Adapun Pra Pelaksanaan FKP itu sendiri adalah sebagai berikut;

1. Pembentukan Tim

Pembentukan Tim Bersama persiapan FPK, Tim terdiri dari gabungan penyelenggara pelayanan public dan pengguna pelayanan

2. Merumuskan konsep

Tim yang sudah dibentuk selanjutnya menentukan target dan sasaran FKP, teknik FKP yang akan dilakukan, jumlah peserta, dan biaya yang diperlukan

3. Pengumpulan Data

Teknik FKP non Tatap Muka dapat dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan FKP

4. Finalisasi

Tim melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan unit layanan, untuk selanjutnya diputuskan pelaksanaan FKP

Tahapan pelaksanaan FKP terdiri dari:

1. Tim Bersikap Netral

Tim bertindak sebagai mediator yang mengarahkan jalannya kegiatan

2. Diskusi 2 arah

Penyelenggara layanan dan masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam rangkaian proses kegiatan

3. Berfokus Pemecahan Masalah

Tim harus bisa mengarahkan kegiatan agar focus pada pemecahan permasalahan yang ada

4. Solusi Merupakan Kesepakatan Bersama

Solusi yang dihasilkan adalah hasil mufakat Bersama, dan tidak boleh ada pihak yang memaksakan kehendaknya

5. Penandatanganan Berita Acara

Berupaya komitmen dan tindak lanjut perbaikan, dan ditandatangani juga oleh pimpinan Instansi.

Yang terlibat dalam Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik sebagai berikut:

1. Masyarakat
 - a. Memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP
2. Penyelenggara
 - a. Mengumumkan hasil tindak lanjut FKP
 - b. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP
3. Pemerintah Pusat
 - a. Menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislative
 - b. Menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat
 - c. Melakukan diseminasi
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi
4. Kepala Daerah
 - a. Menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislative
 - b. Menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat
 - c. Melakukan diseminasi
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP
 - e. Memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal
 - f. Penyediaan anggaran kegiatan FKP
 - g. Monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP

D. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban kepada Bupati Tanah Laut atas penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut

Pelaihari, 03 Juni 2024

Kepala Satuan,



MUH. KUSRI, SP
NIP. 19690315 199803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari Kalimantan Selatan 70814 Telp. (0512) 21775

Pelaihari, 27 Mei 2024

Nomor : 331.1/187/Satpolppdk
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Undangan Kegiatan Forum
Komunikasi Publik (FKP)

Kepada Yth.
daftar undangan terlampir

Di -
Tempat

Dalam rangka peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM), berkaitan hal tersebut diatas kami Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut akan mengadakan kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP) dengan Tema "Penanganan Atas Gangguan Trantibum" yang rencananya akan dilaksanakan pada:

Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
Jam : 09.30 wita s.d Selesai
Tempat : Algoritma Cafe dan Resto
Agenda : Forum Komunikasi Publik (FKP) dengan Tema
"Penanganan Atas Gangguan Trantibum"

Demi Kelancaran kegiatan tersebut, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu agar dapat menugaskan 1 (satu) orang Pejabat/Anggota/Staf untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas kehadiran dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN,

MUH KUSRI, SP

Pembina Utama Muda/ (IV/c)

NIP. 19690315 199803 1 012

Lampiran I Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut

Nomor :

Tanggal : 27 Mei 2024

DAFTAR UNDANGAN

1. Kapolres Tanah Laut
2. Dandim 1009 Pelaihari
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari
4. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari
5. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut
6. Kepala Dinas Sosial Kab. Tanah Laut
7. Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Tanah Laut
8. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanah Laut
10. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Tanah Laut
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut
12. Kepala BNN Kabupaten Tanah Laut
13. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Tanah Laut
14. Kepala Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut
15. Ketua KNPI Kabupaten Tanah Laut
16. Pimpinan/Pengurus Kwarcab Pramuka Kab. Tanah Laut
17. Ketua Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Laut (HPPMTL)
18. Karang Taruna
19. BPK Palam (Pasar Lawas)
20. BPK Tala Jaya
21. LSM
22. LSM
23. Wartawan
24. Wartawan
25. Tokoh Masyarakat
26. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pelaihari



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21775

BERITA ACARA KOMITMEN PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI PUBLIK
PENANGANAN ATAS GANGGUAN TRANTIBUM
DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Forum Komunikasi Publik (FKP) dengan Tema : "Penanganan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024".

Berdasarkan hasil diskusi dan disepakati bersama untuk berkomitmen mendukung kegiatan Penanganan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Tanah Laut sehingga menjadi aman, tertib dan kondusif.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 29 Mei 2024
Yang Mendukung Kegiatan,

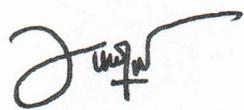

MAJIDI
Aliansi


ASDI YANI
Kai Wala


SYARIF
Humas BPK Palam


RIVI RAMDANI
BEN Politala


M. RIZANI RAKHMAN
Kwarcab Tanah Laut


MUHAMMAD YASIR
KNPI Tanah Laut

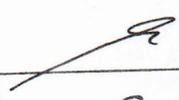
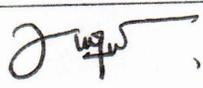
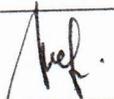
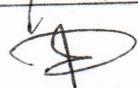
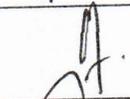
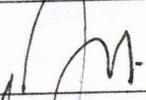
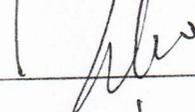
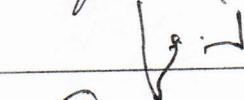
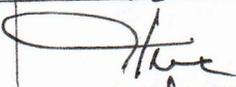
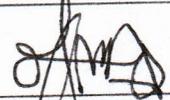
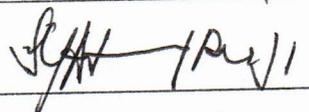
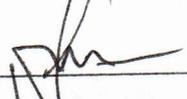
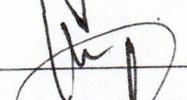
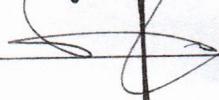
Mengetahui,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tanah Laut

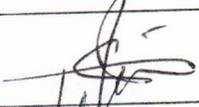
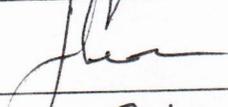
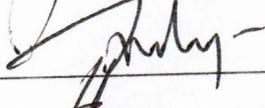
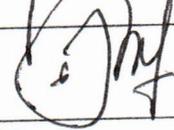
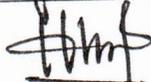
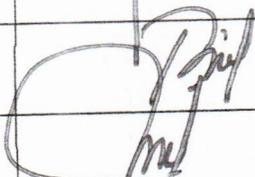
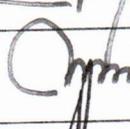
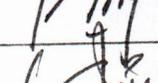
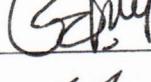
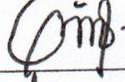


MUH. KUSRI, SP
NID 10600315 100803 1 010

DAFTAR HADIR

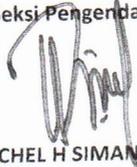
GIATAN : FORUM KOMUNIKASI PUBLIK TERKAIT PENANGANAN ATAS GANGGUAN TRANTIBUM
 HARI /TANGGAL : RABU/ 29 MEI 2024
 LOKASI : ALGORITMA CAFE DAN RESTO

NO	NAMA	INSTANSI /JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rivi RAMDANI	BEM POLITALA	
2	Astri Yanti/Astri wala	Reservasi talia la yot	
3	Erik Kreshab	Bes. Organisasi /Stat	
4	SS9117	BPK PALAM	
5	M. Rizali R.	Kwarcas Tala	
6	Muhammad Yasin	Kipi	
7	Diki	PAKES	
8	TPI CATZO	PAKES	
9	Henny Fitriani	Satpol pp dk	
10	Norhazki	Dispora	
11	Ratna Sari	DISPORA	
12	WANI	Ketara Tala.	
13	Wardana	ko z bang pd	
14	M. Maulana, R.	PPM BNK	
15	Bully Setya Nugrah. S.S	Ketartim Rehabilitasi	
16	Sri Muzi Astuti	DPZKBPZA	
17	Darman Noor	Usaki Seluruh Alumni	
18	MAZINI	Alumni	
19	 (Muzi)	PPK PP	
20	M. Juliansyah	Dinas	
21	Masaminor	Suspa PP	
22	Muhammad Iqbal	Suspa PP	

23	Fidell R	Pol PP	
24	Budi Maulana	Disdikbud	
25	HANANDA	KODIM 1009/TA	
26	Pruddy A	PN Pelaihari	
27	Henky I	Polpp	
28	Erwanu	-	
29	achmad sapiannoor	-	
30	WAHNU E	-	
31	Sevi w.w.A	-	
32	Riduan S. Ap	-	
33	Coafnks	PN Pelaihari	
34	Lastuti	Pol PP	
35	RICKY. W.U	Polpp	
36	Rachel. H. Simanjuntak	-	
37	MUH. KUSRI	KASATPOLPP	
38	KALSAR MUSLIM	KABID TIBUM	
39	Ichwan Sri L	Polpp	
40	Widya Astuti	Polpp	
41	Aulia	Polpp	
42	Endah Tri wahyuni	Polpp	
43	Ratna Yuliana	Polpp	
44	EKA PRASANTI. S	-	
45	Laily Dwi A	-	
46	Gaith Pramesty	-	
47	ari vioriz	-	

48	Manda Sejahng T	purp	Hand
49	Zumrotun Hanikhah	purp	
50	VERNIKA T	-u-	
51	Nuryadi	-u-	
52	agus. p	Mt Perenc	
53	Apr. S		
54	Pelomangal	Kar. Prunur	
55			
56			
57			
58			
59			
60			

Pelaihari, 29 2024
Kepala Seksi Pengendalian dan Penindakan


RACHEL H SIMANJUNTAK, S.STP
NIP. 19950808 201708 1 002

